

BAB VI

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080.
- Asnidar, & Hardi, N. S. (2019). *Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa*. 3(1), 9–18.
- Budianto, B., & Alexander, S. (2016). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(4), 844–851. <https://doi.org/10.35794/emba.v4i4.14511>
- Darwanis, & Saputra, R. (2014). *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh)* (Vol. 1, Issue 2).
- Fitriani, Komara, M., & Peirisal, T. (n.d.). *Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017-2019*.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisa Multivariat dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete SPSS 25 (9th ed.)*. Universitas Diponegoro.
- Hastuti, S. D. (2018). *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan pada BPKPAD Pemerintah*

Kabupaten Kepulauan Selayar.

Lathifa, H., & Haryanto. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017*. 8, 1–10.

Lazyra K.s. (2016). *Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*.

Mukarramah, H. (2017). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Lima Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2014*.

Permendagri No 13 Tahun 2006. (n.d.). *Permendagri No 13 Tahun 2006*.

Permendagri No 21 Tahun 2011. (n.d.). *Permendagri No 21 Tahun 2011*.

PMK No 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran. (n.d.). *Klasifikasi Jenis Belanja*.

https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2011/101~pmk.02~2011perlamp_iii.htm

PMK No 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran. (2018). 150.

PMK No 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. (2016).

PP No 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. (n.d.). *PP No 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*.

<https://doi.org/10.1088/1757-899X/114/1/012081>

PP No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (n.d.). *PP No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

- Purwati, R., & Sumaryanto. (n.d.). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2017*.
- Sasongko, F. A. (2009). *Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Analisis Rasio Keuangan APBD Dalam Era Otonomi Daerah*. 1–9.
- Sino, S., Ruliana, T., & Latif, N. (2016). *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat*.
- Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). (2020). *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2020*.
- Sumawan, W. I. dan, & Sukartha, M. I. (2016). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Kinerja Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(3).
- Tanzeh, A. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Teras.
- UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. (n.d.). *UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=339>
- UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (n.d.). *UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.
- UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. (n.d.). *UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*.
- UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (n.d.). *UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. (n.d.). *UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.

UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah. (n.d.). *UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang*

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.